

DEFORESTASI AMAZON PADA ERA BOLSONARO (2019)

Tine Ratna Poerwantika*

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Pasundan,
Bandung, Indonesia*
tine.ratnapoerwantika@unpas.ac.id

Muhammad Isfandiar Hatami

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Pasundan,
Bandung, Indonesia,*
Isfandiar8@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received

30 June 2021

Revised

5 July 2021

Accepted

7 July 2021

Keywords:

the Amazonian Tropical Forest; deforestation; national interest; capitalistic interests, Bolsonaro.

Kata kunci:

Hutan Tropis Amazon; deforestasi; kepentingan nasional; kepentingan kapitalis; Bolsonaro.

Abstract

This article aims to discuss the dynamics of deforestation in Brazil, especially the Amazon Forest in the Bolsonaro era, and to find out the conflict between environmental and economic issues through a critical perspective. The author uses qualitative research methods using secondary data sources. This article uses the concept of Capital Expansion from David Harvey and Deforestation from William Laurance. The discussion of this article shows that the dynamics of deforestation in Brazil's forests, especially in 2019, were driven by Bolsonaro's pro-market policies with a national interest basis and had effect on environmental destruction in the Amazonian tropical forest through deforestation. This article argues that national interests and capitalistic interests have not been able to reconcile with ecological sustainability in the Amazon Forest, which ultimately impacts deforestation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dinamika deforestasi hutan di Brazil, khususnya hutan Amazon di era Bolsonaro, serta mengetahui konflik antara isu lingkungan dan ekonomi lewat perspektif kritis. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Artikel ini menggunakan konsep Ekspansi Kapital dari David Harvey dan konsep Deforestasi dari William Laurance. Pembahasan dari artikel ini menunjukkan dinamika deforestasi di hutan Brazil khususnya pada tahun 2019 didorong oleh kebijakan pro pasar Bolsonaro dengan landasan kepentingan nasional dan berpengaruh pada perusakan lingkungan hidup di hutan tropis Amazon lewat deforestasi. Artikel ini berargumen bahwa adanya kepentingan nasional dan kepentingan kapitalistik yang belum dapat berdamai dengan kelangsungan lingkungan hidup di hutan Amazon yang pada akhirnya berdampak pada deforestasi.

PENDAHULUAN

Deforestasi berkaitan dengan perubahan iklim menjadi perhatian masyarakat internasional, sebab pada kenyataannya deforestasi sebagai fenomena yang secara signifikan dapat berpotensi menghasilkan ketidakstabilan ekosistem dengan pelepasan emisi karbon berlebih yang bermuara pada pemanasan global (Wells 2019). Namun, deforestasi masih sering terjadi di berbagai hutan di beberapa negara, terutama negara yang memiliki teritorial hutan yang luas.

Hutan tropis Amazon menjadi salah satu kasus konkret dari diskursus deforestasi. Hutan Amazon adalah salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di bumi. Hutan Amazon adalah rumah bagi hampir 10 persen mamalia dunia dan 15 persen spesies tumbuhan darat yang dikenal di dunia, dengan sebanyak 300 spesies pohon dalam satu hektar, (Greenpeace 2006) yang menurut para ilmuwan memberi planet ini 20 persen oksigennya (Schepers 2019). Dinamika deforestasi di Amazon cenderung mengalami

peningkatan secara gradual dari tahun ke tahun, dan semakin memburuk di tahun 2019 seperti yang dapat dilihat dari laporan *Greenpeace* pada 2019 sebagai berikut: Brazil telah mengalami peningkatan tajam dalam kebakaran dan deforestasi pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir. Laju deforestasi tahunan telah mencapai hampir 1 juta hektar (ha) untuk pertama kalinya dalam satu dekade (Greenpeace 2019).

Dari tahun 2000 hingga tahun 2006 dinamika deforestasi telah merepresentasikan harmoni antara kepentingan pemerintahan yang berkisar pada aspek peningkatan ekonomi dengan kepentingan perusahaan multinasional pada aspek perluasan lahan yang menghasilkan berbagai dampak multidimensi terhadap kelangsungan hutan di Brazil terkhususnya hutan Amazon dan sekitarnya. Peran Brazil sebagai pemasok kedelai global menghasilkan legitimasi bagi izin perluasan lahan perusahaan multinasional di sektor terkait. Namun terlepas daripada itu, proses deforestasi

pun turut dipraktikkan oleh berbagai elemen seperti masyarakat yang mencoba peruntungan di pertanian kedelai dan peternakan (babi, sapi, dan lain-lain) (Greenpeace 2006).

Meskipun demikian, telah muncul kebijakan-kebijakan alternatif dalam dinamika deforestasi hutan di Brazil lewat pembangunan kesepakatan antara berbagai elemen terkait seperti halnya yang pernah digagas oleh aktor non pemerintahan yaitu *Greenpeace*. Dengan konsepsi moratorium kedelai dan daging pada tahun 2006 dan tahun 2009 menghasilkan dampak yang cukup signifikan dalam memerangi fenomena deforestasi yang tidak terkendali di Brazil (Greenpeace 2019).

Namun hutan Amazon kembali terancam dengan terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai Presiden pada 2018 lalu. Bolsonaro memiliki tendensi untuk mereformasi kebijakan-kebijakan kelestarian lingkungan menjadi ramah terhadap pasar, ditandai dengan kampanye pemilihan 2018, Bolsonaro berulang kali berjanji untuk melemahkan Badan lingkungan pemerintah Brazil

untuk membuka kawasan lindung dan tanah adat untuk pertanian dan pertambangan. Dia juga berulang kali mengancam untuk menarik diri dari *Paris Agreement* (Greenpeace 2019). Pada bulan Juli dan Agustus 2019, peringatan resmi untuk deforestasi Amazon Brazil yang telah meningkat pada paruh pertama tahun 2019, setelah Bolsonaro menjabat, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Aguiar 2019). Pada November 2019, INPE mengkonfirmasi bahwa laju deforestasi tahunan Amazon untuk periode Agustus 2018–Juli 2019 telah meningkat menjadi hampir satu juta ha untuk pertama kalinya sejak 2008 (Greenpeace 2019).

Dengan mempertimbangkan deforestasi sangat mendorong percepatan perubahan iklim (Wells 2019), terlebih hutan Amazon memiliki kekayaan nilai ekologis yang terancam akan hilang (Greenpeace 2006), maka menjadi penting untuk melihat dan menganalisis bagaimana dinamika deforestasi di hutan Amazon, khususnya terkait dengan pemerintahan Bolsonaro.

Artikel ini berfokus pada dinamika deforestasi hutan Amazon pada era Bolsonaro tahun 2019.

Adapun literatur terdahulu sebagai pembanding yaitu jurnal yang ditulis oleh Kartika Yustika Mandala Putri pada tahun 2016, dengan judul penelitian "Greenpeace Diplomacy Menahan Deforestasi di Amazon". Jurnal ini lebih ditekankan pada analisis tindak lanjut yang diambil oleh Greenpeace dalam upayanya memerangi deforestasi di Amazon, serta upaya pelarangan kedelai yang disepakati oleh semua pihak, menghasilkan komitmen untuk membatasi produksi kedelai Amazon dengan tajuk moratorium kedelai dan slogan *zero deforestation* (Mandala, 2016). Perbedaan yang mendasar dengan literatur tersebut adalah rentang waktu yang diteliti dan sekaligus menjadi pembaruan terhadap isu deforestasi di Amazon, terlebih yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah perspektif kritis yang dipakai untuk menganalisis fenomena yang terjadi dan korelasi antar aktor yang terkait, serta penelitian ini mendasarkan fokus analisis pada sistem kapitalisme.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, pertama, didasarkan pada pemenuhan sendiri atau kebutuhan dalam negeri dan kedua, mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya (environmental external) agar pemenuhan kepentingan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kedaulatan wilayah negara, stabilitas politik dalam negeri, dan menjaga identitas budaya dari ancaman negara lain (Husna 2012). Konsep ini akan penulis gunakan untuk menguji rasionalisasi penerapan kebijakan-kebijakan Bolsonaro, khususnya terkait kebijakan yang berkorelasi dengan kelestarian Amazon.

Ekspansi Kapital

Untuk lebih memperjelas analisis ini, penulis juga menggunakan teori akumulasi modal dan relevansinya dengan tanah (reorganisasi spasial), yang secara teoritis dielaborasi oleh David Harvey. Teori ini didasarkan pada akumulasi primitif dari yang diprakarsai

oleh Karl Marx dalam Kapital jilid III, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan akumulasi kapital yang terus berlanjut akan menyebabkan konsentrasi kapital; yang akan mengarah pada kejenuhan akumulasi kapital itu sendiri dan pada akhirnya mengarah pada krisis prediksi kapitalisme. Untuk menghindari krisis kapitalisme yang secara alamiah muncul dari sistem kapitalis. Kapital harus diperluas ke bidang baru yang nilainya lebih rendah, sehingga akumulasi kapital dapat pulih dari krisis alaminya (Harvey 2003). Teori ini akan memperlihatkan bersinggungan antara kepentingan pemerintahan Brazil dan kepentingan perusahaan multinasional yang saling berkorelasi menghasilkan ekspansi kapital yang masif. Ekspansi kapital akan berdampak pada ekonomi, politik dan aspek lainnya, terutama terhadap nilai ekologi, salah satunya deforestasi.

Deforestasi

Konsep pertama yang digunakan untuk menganalisis deforestasi di Amazon terkait dengan deforestasi yaitu konsep William Laurance, yang

mencoba menyederhanakan deforestasi dengan mengadaptasi segala sesuatu di tahun 2000-an. Laurance menggunakan empat faktor yang saling mempengaruhi dalam menggambarkan faktor terpenting pendorong deforestasi, yaitu peningkatan populasi, peraturan kehutanan nasional dan kebijakan perlindungan hutan yang lemah, logger (penebang pohon).

Peningkatan populasi. Ukuran kepadatan atau pertumbuhan penduduk merupakan prediktor penting deforestasi pada skala nasional atau regional, seperti kemiskinan dan kepemilikan lahan yang tidak setara. Populasi yang dilanda kemiskinan, yang berjumlah sekitar 800 juta di seluruh dunia, menyebabkan jumlah deforestasi dunia yang tidak proporsional, selain itu, pertumbuhan penduduk akan memperburuk deforestasi karena berpotensi memperburuk berbagai faktor mikro ekonomi dan makroekonomi, seperti memperburuk kegagalan pasar, mengurangi pendapatan per kapita, mengubah pasar tenaga kerja, dan meningkatkan permintaan konsumsi (Laurance 1999). Sederhananya lebih

banyak jumlah populasi orang maka akan mengurangi jumlah hutan karena adanya alih fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat.

Peraturan kehutanan nasional dan kebijakan perlindungan hutan yang lemah merupakan salah satu masalah yang sudah berlangsung lama, karena lemahnya penegakan hukum yang melindungi hutan tropis. Ditambah dengan tidak konsistennya penegak hukum yang tidak tuntas menyelesaikan masalah hutan menjadi faktor penyebab terjadinya deforestasi (Laurance 1999).

Logger atau penebangan akan terus menjadi isu yang sangat penting dalam perlindungan hutan tropis. Di seluruh dunia, sekitar 80 persen penebangan tropis terjadi di hutan purba (Laurance 1999).

PEMBAHASAN

Deforestasi Amazon

Deforestasi bukan hal baru bagi hutan tropis Amazon, karena senyatanya dinamika deforestasi terus menjadi ancaman dari sejak lama, namun peningkatan deforestasi muncul

kemudian pada tahun 1971 seiring dengan pemberitaan media yang semakin masif perihal pentingnya mempertahankan hutan demi kestabilan ekosistem dan iklim dunia (Moran 1993).

Antara 2004 dan 2005, laju deforestasi melonjak ke level tertinggi dalam satu dekade, dan telah kembali ke rata-rata 25 tahun, yaitu sekitar 18.000 kilometer persegi per tahun. Presiden Brazil Lula da Silva tidak dapat menghentikan invasi Amazon ini. Sejak Januari 2003 hingga 2005, hampir 70.000 kilometer persegi hutan hujan telah ditebangi. Dan area dengan ukuran yang sama akan terdegradasi oleh penebangan, membuat Amazon lebih rentan terhadap penembakan dan serangan petani. Hal ini disebabkan oleh rencana perdagangan yang dipercepat, pertumbuhan permintaan di beberapa bagian Eropa dan kurangnya tata kelola, sistem sertifikasi tanah yang lemah dan kegagalan untuk melindungi lahan publik di Amazon, yang membuat perampasan tanah dan deforestasi ilegal menjadi mudah, berisiko rendah dan murah (Greenpeace 2006).

Selain kebijakan yang belum terlalu fokus pada komitmen pelestarian hutan tropis khususnya Amazon. Faktor pendorong utama deforestasi di Amazon pada periode 2001-2006 adalah perluasan dari perkebunan kedelai dan peternakan yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan konsumsi global yang semakin meningkat di setiap tahunnya, khususnya permintaan dari Eropa (Gibbs et al. 2015).

Secara spesifik dalam sektor komoditas kedelai, *Greenpeace* telah mengidentifikasi tiga perusahaan yang secara signifikan terkait dengan deforestasi dalam periode ini, yaitu Archer Daniel Midland (ADM), Bunge, Cargill. Ketiga perusahaan multinasional tersebut adalah perusahaan berbasis di Amerika Serikat, serta memiliki aspek monopoli komoditas dengan segmentasi makanan dan minyak di Eropa. Ketiga perusahaan ini memasok komoditas kedelai berprotein tinggi untuk industri pakan ternak di Eropa, demi menghasilkan daging yang berkualitas tinggi dan susu yang intensif (Greenpeace 2006).

Perusahaan-perusahaan ini juga mengontrol aspek lain dari rantai pasokan makanan, seperti ternak skala besar dan pemrosesan daging Cargill, tidak hanya menjadikan mereka pembeli, pemasok, dan pengolah kedelai, tetapi juga menjadikan mereka konsumen kedelai. Mereka memperluas pengaruhnya di Amazon dengan mendirikan fasilitas penyimpanan dan pemrosesan, dan mendorong pengembangan serta perluasan pertanian ilegal akibat deforestasi hutan hujan, dan pengoperasian hutan hujan dicapai dengan bantuan infrastruktur yang sudah mapan oleh perusahaan (Greenpeace 2006).

Perusahaan-perusahaan multinasional tidak terlepas dari sifat monopolistik di berbagai bidang seperti pengadaan pupuk, benih dan komoditas produksi lainnya yang dapat menjadi daya tarik petani-petani hingga masyarakat di sekitar Amazon untuk turut bergerak ke lahan-lahan Amazon dan mengaktivasi lahan sebagai lahan perkebunan kedelai ataupun peternakan daging.

Namun fenomena ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintahan setempat yang cenderung memfasilitasi aktivasi lahan di hutan Amazon dengan berbagai kebijakan yang menjadi peraturan secara konstitusi yang kuat serta mampu menindak entitas penolakan secara polisional. Blairo Maggi pada tahun 2002, ketika terpilih sebagai gubernur, ia menambahkan pengaruh politik pada kekuatan ekonominya, dan menyerukan tiga kali lipat wilayah yang ditanami kedelai di Mato Grosso selama dekade berikutnya. Pada tahun pertama Maggi menjabat sebagai gubernur, laju deforestasi tahunan di Mato Grosso meningkat sekitar 30 persen. Ketika ditanya tentang tingkat deforestasi yang tinggi ini dalam sebuah wawancara dengan *New York Times*, Maggi secara sederhana mengatakan rasa tidak bersalah atas yang telah terjadi, dan mengemukakan bahwa bukan menjadi rahasia lagi perihal keinginannya untuk membangun jalan dan memperluas produksi pertanian (Greenpeace 2006).

Blairo Maggi tidak sekedar gubernur Mato Grosso, namun juga kepala Grupo André Maggi, produsen

kedelai individu terbesar di dunia pada tahun 2005. Blairo Maggi sendiri adalah aktor utama perdagangan internasional dalam sektor kedelai dari Brazil yang memiliki kapasitas ekspor lebih dari dua juta ton kedelai setiap tahunnya. Dengan hak istimewa sebagai Gubernur Mato Grosso, perusahaan Andre Maggi memiliki kemudahan akses perihal pinjaman finansial untuk menopang pelbagai kebutuhan perusahaan seperti halnya studi kasus pada kreditor Bank Dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) serta bank publik/swasta lainnya yang tercatat telah mengalirkan pinjaman finansial terhadap perusahaan Andre Maggi kurang lebih berjumlah 660 juta dolar pada tahun 2005 (Greenpeace 2006).

Tentunya pinjaman finansial dari Bank telah berperan penting dalam dinamika perusahaan Andre Maggi, dengan hadirnya pinjaman finansial yang kuat telah membantu perusahaan membiayai pembayaran uang muka kepada pemasok dan pengembangan infrastruktur untuk penyimpanan dan transportasi komoditas kedelai. Pada tahun 2002, Grupo André Maggi

mendapatkan pinjaman pertama dari dua 30 juta US dolar dari IFC untuk memperbesar kapasitas penyimpanan perusahaan dan untuk membiayai produksi kedelai oleh petani kontraknya (Greenpeace 2006).

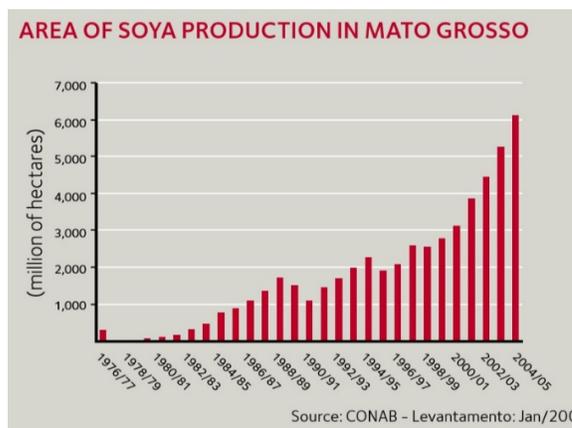
Hal ini menunjukkan relevansi teori Harvey tentang logika kekuasaan dan logika teritorial. Meskipun kedua logika ini berbeda dan sering saling menghancurkan, pada titik tertentu, kedua logika tersebut memiliki kepentingan yang kompatibel (Harvey 2003). Di jalan inilah yang dikatakan Arendt bahwa surplus tidak terbatas harus dibarengi dengan kekuatan politik yang tidak terbatas (Harvey 2003). Ini terjadi di Brazil pada awal ekspansi pertanian skala besar negara itu, seperti yang ditunjukkan oleh kepentingan perusahaan kedelai nasional (seperti perusahaan kedelai Andre Maggi Group) dan perusahaan multinasional Amerika Serikat (Archer Daniel Midland, Bunge). Cargill merepresentasikan logika kapital (logika kekuatan) dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Brazil dengan indikator Gubernur Andre Maggi

yang menyatakan ketertarikannya dengan menyediakan fasilitas sistematis untuk mendorong pembangunan ekonomi, memperluas perusahaan swasta, dan memberikan kontribusi jangka pendek untuk mempermudah ekspansi perusahaan multinasional. Tentu saja, kedua logika ini sejalan dengan dampak perubahan besar terhadap kondisi politik dan ekonomi, Dampak paling nyata pada tulisan ini adalah terhadap nilai ekologi. Dengan dukungan kepentingan logika kapitalis, kemunculan ruang kapital baru bertepatan dengan kepentingan pemerintah Brazil yang berdampak pada ruang (*space*), yang oleh Harvey disebut reorganisasi spasial. Salah satu dampak penataan ruang adalah perluasan lahan untuk tujuan komersial yang sangat cepat, murah dan mudah. Salah satu dampaknya adalah deforestasi, dengan motivasi untuk membuka ruang baru di hutan tropis Amazon.

Skema harmonisasi antara kepentingan pemerintahan Brazil dalam aspek ekonomi serta kepentingan perusahaan multinasional dengan surplus

tak terbatas lewat perluasan lahan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap deforestasi di Amazon khususnya di Mato Grosso sendiri yang tercatat dari 2004 hingga 2005 mencapai di kisaran 6000 juta hektar lahan yang telah dikonversi menjadi lahan monokultur kedelai di Mato Grosso (Greenpeace 2006).

Gambar 1. Produksi kedelai di Mato Grosso



Sumber: diolah oleh Greenpeace 2006

Sementara itu disisi lain, permintaan spiral untuk pakan ternak dari agribisnis Eropa mendorong perluasan (ekspansi) pertanian untuk terus bergerak ke hutan Amazon yang belum terbuka. Dengan mengacu kepada narasi Greenpeace pada 2006 bahwa Eropa membeli setengah dari kedelai

yang diekspor dari daerah Amazon, yaitu Mato Grosso, sekitar 90 persen kedelai ditanam. Daging sebagai output dari peternakan dengan pakan kedelai berprotein tinggi masuk ke rak-rak supermarket dan penghitung makanan cepat saji di Eropa seperti McDonald dan Burgerking (Greenpeace 2006).

Dari permintaan yang tinggi terhadap daging di Eropa memiliki korelasi yang kuat terhadap kebutuhan pasokan kedelai yang lebih banyak pula sebagai pakan hewan ternak berprotein tinggi yang menjadi sumber kausalitas terhadap diperlukannya lahan yang lebih luas untuk memproduksi komoditas kedelai yang dibutuhkan. Namun tak hanya perkebunan kedelai saja yang terpengaruh oleh konsumsi daging yang tinggi, peternakan hewan pun turut serta terdorong untuk memperluas peternakan hewan demi kecukupan konsumsi dan permintaan dunia khususnya Eropa.

Inisiatif Moratorium

Moratorium Kedelai

Dengan indikasi kuat ke arah deforestasi yang masif dan ekspansi yang

berkelanjutan dengan potensi besar bagi permasalahan destabilisasi iklim bumi, degradasi spesies di Amazon serta ancaman lainnya yang bersumber dari terganggunya nilai ekologi di hutan tropis Amazon, pada tahun 2006 muncul inisiatif dari berbagai elemen untuk mulai membuat regulasi perihal meminimalisir ekspansi lahan kedelai ke Amazon. Berbagai elemen terkait khususnya lembaga Non Pemerintah (NGO) memberikan tekanan terhadap para perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor kedelai untuk lebih bisa menyortir pasokannya dari hal yang berkaitan dengan deforestasi (setelah Juli 2006) serta membatasi lahan untuk ekspansi di hutan Amazon dengan memaksakan optimalisasi lahan yang telah di gunduli (Gibbs et al. 2015).

Pada 24 Juni 2006 *Association of Vegetable Oil Industries* (ABIOVE) dan *Association of Cereal Exporters in Brazil* (ANEC) menyewa perusahaan untuk memantau deforestasi di area yang lebih besar dari 100 ha di kota-kota dengan lebih dari 5000 ha perkebunan kedelai di bioma Amazon di negara bagian Mato

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, dan Amapá. Area yang dipantau termasuk 37 kota (Silva and Lima 2017).

Inisiatif penghambatan ekspansi dan deforestasi pada sektor produksi kedelai di Brazil dengan nama Moratorium kedelai telah membuahkan hasil semenjak adanya kesepakatan moratorium kedelai, para perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor kedelai memberikan pernyataan bahwa rantai pasokan dan rantai nilai mereka telah menjadi “*Green*” (terlepas dari fenomena perusakan hutan dan ramah lingkungan) (Mandala 2016).

Larangan kedelai ini harus dianggap sebagai inisiatif yang terpuji. Dalam proses perlindungan hutan tropis Amazon, semua sektor termasuk masyarakat, departemen produksi dan pemerintah harus dilibatkan. Langkah ini patut mendapat pujian lebih, karena langkah pelarangan kedelai adalah untuk merangsang kepentingan ekonomi Brazil dan kepentingan perusahaan multinasional untuk memenuhi permintaan konsumsi komoditas pertanian global, yang dapat menekan

laju deforestasi. Hal ini secara langsung membuktikan rasionalitas perusahaan multinasional dan petani untuk terus membuka lahan baru di Amazon. Namun keberhasilan ini tidak sepenuhnya menekan laju deforestasi di Amazon, karena dalam catatan data yang ditulis oleh Silva Junior dan Mandelson Lima, hasilnya menunjukkan bahwa deforestasi itu belum hilang sepenuhnya.

Lewat penelitian yang dilakukan oleh Silva Junior dan Mandeso Lima yang memperlihatkan perihal laju deforestasi antara 2009 dan 2012 dengan deforestasi tahunan rata-rata bagian di Amazon adalah 78,947 ha per tahun. Antara 2013 dan 2016, angka dari deforestasi rata-rata tahunan meningkat kembali dengan angka 117,302,5 ha. Selain itu antara tahun 2009 dan 2016, diidentifikasi terdapat 54 kota yang tidak sesuai dengan Moratorium Kedelai; total 59972 ha telah dikonversi menjadi perkebunan kedelai, hal ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dengan angka 48,58 persen dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Serta ditemukan pula bahwa selama moratorium

diimplementasikan kedelai ditanam di 37.155 ha yang melanggar moratorium kedelai; ini mewakili 1,1 persen dari area yang terdeforestasi dalam bioma selama waktu itu, dan menyumbang 4,6 persen dari kasus deforestasi di 87 kota. Hasil dari angka-angka deforestasi yang muncul menunjukkan bahwa pendorong utama deforestasi tetap pertanian, dengan konversi lahan pertanian dan kedelai yang umumnya menempati area yang dibuka sebelum tahun 2006. Kedelai tetap menjadi faktor deforestasi terbesar kedua setelah peternakan sapi, kedelai memberikan ancaman besar pada hutan dan bertanggung jawab atas 32,58 persen deforestasi yang terjadi setelah panen 2007. Indeks ini tetap signifikan setelah 2009 (29,49 persen) (Silva and Lima 2017).

Hal yang luput dari inisiatif moratorium kedelai sendiri bisa ditemukan pada beberapa faktor, namun yang utama ialah inisiatif moratorium belum bisa terimplementasikan secara menyeluruh sampai ke titik jangkauan paling jauh yang memiliki potensi perusakan terhadap hutan lewat pertanian kedelai. Dengan

mempertimbangkan deforestasi mulai tahun 2006 jumlah penanaman kedelai yang melanggar moratorium kedelai akan setara dengan total perkiraan 350.000 ton (Silva and Lima 2017). Menghasilkan indikasi kuat bahwa masih ada pelanggaran komitmen dari inisiatif moratorium kedelai yang telah disepakati dikarenakan pemantauan dari implementasi moratorium kedelai belum bisa secara menyeluruh mencakup seluruh hutan yang dimasukkan dalam kategori lahan yang dilindungi.

Dampak yang lain sebagai konsekuensi dari moratorium kedelai yang telah disepakati adalah adanya ekspansi perusahaan multinasional disektor kedelai ke lahan-lahan yang terlepas dari kesepakatan moratorium kedelai, dan berekspansi keluar dari teritorial hutan Amazon seperti halnya hutan yang memiliki nilai ekologis penting di Marika Selatan, termasuk Cerrado dan sekitarnya. Penting untuk diketahui bahwa Cerrado adalah daerah yang di mana setidaknya 40 persen kedelai Brazil diproduksi pada tahun 2017, sebanyak 60 persen diekspor.

Tercatat Bunge, Cargill, ADM, Louis Dreyfus, COFCO International dan Amaggi menyumbang dua pertiga dari semua kedelai yang diekspor dari Cerrado Menghasilkan angka-angka deforestasi yang cukup signifikan antara 2010 dan 2017, hampir tujuh juta hektar hutan alam Cerrado dan 4,4 juta hektar padang rumput alamnya telah ditebangi untuk peternakan sapi dan tanaman kedelai (Greenpeace 2019).

Moratorium Daging 2009

Selain produksi pertanian kedelai yang memiliki pengaruh signifikan sebagai pendorong laju deforestasi di Amazon, ada pula pendorong deforestasi lainnya yang turut memiliki kontribusi besar terhadap perusakan lingkungan di wilayah hutan Amazon yaitu peternakan. Peternakan hewan tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap deforestasi hutan Amazon yang menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) melalui perubahan penggunaan lahan (FAO 2016). Selain emisi ini, ternak mengeluarkan sejumlah besar metana enterik (CH₄) sebagai akibat dari

biologis proses pencernaan ruminansia. Gas metana dianggap sebagai kontributor terbesar kedua untuk pemanasan global, setelah CO₂ (de Area Leão Pereira et al. 2020).

Dengan kesadaran kolektif antara elemen-elemen terkait di Brazil telah menghasilkan kesepakatan serupa dengan inisiatif moratorium kedelai yang telah diimplementasikan. Inisiatif moratorium turut serta diterapkan dalam sektor peternakan hewan di hutan Amazon, seperti halnya yang bisa dikutip dari penelitian Butler pada 2009 yang mana menunjukkan empat produsen dan pedagang ternak terbesar di dunia telah menyepakati untuk mengikuti komitmen moratorium pembelian ternak dari daerah yang diindikasikan terkait dengan proses deforestasi dan proses perusakan hutan lainnya, JBS-Friboi, Bertin, Minerva dan Marfrig berkomitmen menerapkan sistem sertifikasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa daging sapi dan kulit dalam rantai pasokan mereka tidak diproduksi sebagai hasil dari pembukaan hutan baru (Butler 2009).

Dari komitmen yang telah disepakati dalam kerangka moratorium peternakan (daging) menghasilkan syarat kriteria minimum yang harus dipatuhi oleh para perusahaan yang bergerak dalam sektor peternakan adalah: (1) *Zero Deforestation in Supply Chain*, (2) *Rejection of Invasion of Indigenous Land and Protected Areas*, (3) *A Monitorable, Verifiable and Reportable*, (4) *Implementation of The Supply Chain Commitment* (Butler 2009). Para aktor yang terkait dalam rantai pasokan komoditas ternak harus mematuhi syarat kriteria minimum dari inisiatif moratorium daging, dan menjamin bahwa rantai pasokan mereka telah ramah lingkungan tanpa terkait dengan perusakan lingkungan terutama deforestasi.

Jair Bolsonaro

Pada 2018, Anggota kongres sayap kanan, Jair Bolsonaro meraih kemenangan besar di putaran pertama pemilihan presiden Brazil menyusul salah satu kampanye paling terpolarisasi sejak negara itu kembali ke demokrasi tiga dekade lalu. Bolsonaro mendapatkan

200

46 persen suara diikuti urutan kedua oleh Fernando Haddad dari Partai Buruh (PT) dengan 29 persen. Kemenangan di babak kedua bagi mantan kapten angkatan darat Bolsonaro akan menandakan pergeseran bersejarah ke kanan di Brazil (Wilkinson and Reverdosa 2018).

Jair Bolsonaro lahir pada 21 Maret 1955 di Glicero, Sao Paulo, Brazil bagian tenggara. Bolsonaro masuk Angkatan Darat Brazil usai menamatkan sekolah menengah atas. Di lembaga ini pendirian sayap-kanannya mulai terbentuk. Sikapnya ambisius dan agresif. Ia pernah menulis secara kritis soal gaji tentara. Akibatnya ia dipenjara selama 15 hari. Namun, sejak saat itu ia meraih popularitas. Selama 26 tahun bekerja di Kongres Nasional Brazil, Bolsonaro mantap berdiri di jalur konservatif. Ia mendukung kebijakan ekonomi pro-pasar dan pendalaman nilai-nilai kekeluargaan sesuai ajaran Kristen Evangelis (Hasan 2018).

Bolsonaro, berhubungan erat dengan jalur konservatifnya, terkenal dengan narasi-narasi seksis, misoginis dan rasis. Hal ini terlihat jelas dengan

narasi-narasi semasa kampanye maupun sebelum. Dia pernah mengatakan kepada seorang anggota kongres selama sidang parlemen bahwa dia tidak pantas diperkosa karena dia "sangat jelek", lapor TV Globo Brazil. Dia juga mengatakan di depan umum bahwa dia lebih suka melihat putranya meninggal dalam kecelakaan daripada anggota keluarganya menjadi homoseksual. Tetapi para pemilih melihatnya sebagai kandidat anti-kemapanan yang telah berjanji untuk memerangi korupsi dan mengatasi kekerasan. Selain elemen konservatif di kepolisian dan angkatan bersenjata, Bolsonaro didukung oleh lobi evangelis dan para aktor agrobisnis yang kuat (Wilkinson and Reverdosa 2018).

Namun yang lebih krusial daripada itu, selama kampanye Bolsonaro kerap kali mengungkapkan narasi-narasi yang mengindikasikan sikap abai terhadap nilai-nilai ekologi di Brazil khususnya di Bioma Amazon. *Greenpeace* merekap fakta bahwa selama kampanye pemilu 2018, Presiden Brazil Jair Bolsonaro berulang kali berjanji untuk melemahkan lembaga lingkungan pemerintah Brazil

dan membuka kawasan lindung dan tanah adat untuk pertanian dan pertambangan. Dia juga berulang kali mengancam akan menarik diri dari *Paris Agreement* jika upaya internasional dilakukan untuk membatasi ekspansi pertanian di Amazon Brazil (Greenpeace 2019).

Poin penting dalam diskursus ekologis karena menghasilkan tendensi *destruktif* bagi kelestarian nilai ekologi di Brazil yang berkorelasi dengan percepatan perubahan iklim dunia. Dan dengan cerminan sosok Jair Bolsonaro sebagai presiden baru Brazil menghasilkan kekhawatiran mendalam bagi pemerhati lingkungan karena sikap yang sangat pro terhadap pasar bebas dan abai terhadap lingkungan, hingga tidak menghormati hak masyarakat adat. Konsekuensi logis yang akan lahir dari terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai presiden ialah lahirnya kebijakan yang memfasilitasi perusakan lingkungan dengan dalih peningkatan ekonomi.

Setelah mencapai kemenangan menjadi presiden Brazil pada 28 Oktober 2018 Bolsonaro yang juga dikenal sebagai *Tropical Trump* (Hunter and

Power 2019) langsung mengabsahkan kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap kelestarian hutan di Brazil berorientasi bisnis, serta melakukan pengurangan anggaran hingga pembubaran terhadap lembaga yang secara fungsional menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan Amazon dan sekitarnya.

Seperti halnya yang terjadi di April 2019, Komite Antar Menteri untuk *climate change* serta kelompok eksekutifnya, bersamaan dengan Komisi REDD+ Nasional dibubarkan dalam masa kepresidenan Bolsonaro (Greenpeace 2019). Selain itu, terdapat pengalihan mandat dinas kehutanan Brazil dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Kementerian Pertanian, yang hal ini mengindikasikan orientasi langkah kebijakan yang lebih bersifat bisnis ketimbang konservasi hutan hujan Amazon dan sekitarnya (Greenpeace 2019).

Adapun pengurangan (pemangkasan) anggaran untuk beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap perlindungan lingkungan

sebesar 95 persen dari kebijakan anggaran perubahan iklim, 26 persen dari anggaran konversi federal, 24 persen dari inspeksi IBAMA dan anggaran program kontrak, 20 persen dari anggaran program inspeksi lingkungan, pencegahan, dan pencegahan kebakaran hutan ICMBIO (ICMBIO bertanggung jawab atas 327 unit perlindungan federal, setara dengan 75,9 hektar tanah) dan pemotongan, yang melibatkan Pengurangan biaya, seperti pembelian bahan bakar transportasi untuk pemantauan hutan dan penempatan agen yang terkait dengan deforestasi (de Area Leão Pereira et al. 2020).

Kulminasi dari langkah kebijakan yang dilakukan pada masa kepresidenan Jair Bolsonaro telah menghasilkan tendensi ke arah pelemahan penjagaan dan perlindungan lingkungan hidup terkhususnya hutan hujan Amazon dan sekitarnya yang menjadi sasaran untuk perluasan lahan produksi baik peternakan dan perkebunan kedelai, sekaligus langkah yang dikeluarkan oleh pemerintahan Brazil pada masa kepresidenan Bolsonaro menghasilkan

permudahan akses bagi pelaku agribisnis melakukan ekspansi ke ranah-ranah yang belum terjamah kapital terlebih hal ini dijadikan ajang promosi investasi di Brazil.

Ekspansi kapital ke arah hutan hujan di Brazil semakin didorongkan oleh kebijakan-kebijakan yang secara sistematis memberikan izin akses terhadap pelaku ekonomi dengan atas nama perbaikan kondisi instabilitas ekonomi dan politik. Presiden dan masing-masing parlemen serta kelompok Senat mengeluarkan undang-undang yang mendukung ekspansi ternak yang tidak terkendali. Sapi yang dibesarkan di peternakan kosong dijual ke industri makanan, yang mengekspor sebagian produknya. Agribisnis mendanai kursi di Parlemen dan Senat, yang terakhir memilih untuk memelihara ternak (de Area Leão Pereira et al. 2020).

Kerja sama antara para pelaku agribisnis dan pemerintah Brazil telah menghasilkan kebijakan yang memfasilitasi perluasan dan pengembangan wilayah Amazon dengan dalih kepentingan ekonomi negara. Sama

seperti Keputusan Presiden Sementara Nomor 910 (PPD/ *Provisional Presidential Decree*) (Brazil Government 2019) yang ditandatangani oleh Presiden Jair Bolsonaro pada 2019, yang memudahkan peserta ekonomi Amazon untuk memperluas lahan. Undang-undang tersebut melegalkan lahan publik Amazon yang luas yang sebelumnya dibuka secara ilegal antara 2008 dan Desember 2018 (Aguiar 2019).

Berbagai kebijakan yang diabsahkan oleh Bolsonaro mengandung tendensi *destruktif* bagi kelestarian nilai ekologi di Brazil terkhususnya bioma Amazon, namun sekiranya perlu juga untuk menganalisis lebih dalam perihal rasionalisasi dari kebijakan yang dicanangkan oleh Jair Bolsonaro dan pemerintahannya. Hal ini dapat dikupas lewat analisis kepentingan nasional Brazil yang berkorelasi langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bolsonaro.

Kepentingan Nasional Brazil

Dalam hal analisa kepentingan nasional, Morgenthau menjabarkan

elemen pembangun kepentingan nasional, yaitu harus mempertimbangkan pemenuhan diri sendiri atau pemenuhan kebutuhan domestik serta mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya (*environmental external*) (Husna 2012). Dengan konsep kepentingan nasional Morgenthau, didapati dua elemen yang harus ditelusuri lebih dulu untuk menjabarkan rasionalisasi dari kebijakan pemerintahan Brazil terkhususnya terkait hutan Amazon. Terlebih dahulu elemen pertama yaitu pemenuhan kebutuhan domestik akan dianalisis lewat deskripsi dari kondisi ekonomi politik yang eksis di Brazil pada tahun 2019 dan sebelumnya untuk lebih memperjelas permasalahan dan kebutuhan di Brazil.

Kondisi Ekonomi Politik di Brazil 2019

Kondisi ekonomi politik Brazil pada 2019 senyatanya tengah menghadapi instabilitas dari semenjak 2014 yang memiliki implikasi multidimensi. Setidaknya ada empat stimulan yang mendorong ke arah instabilitas ekonomi dan politik di Brazil yaitu krisis terhadap lingkungan, krisis

politik (ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan partai yang ada), korupsi yang berlarut, dan yang terkahir adalah ekonomi (Hunter and Power 2019).

Brazil dihadapkan dengan krisis politik. Fenomena krisis politik di Brazil didorong oleh isu-isu korupsi pada elemen yang berada pada lingkaran pemerintahan, seperti halnya kasus *Operation car wash* pada maret 2014 yang menjerat para pemimpin dan tokoh senior di berbagai partai politik yang berkuasa. Hal ini meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat Brazil terhadap pemerintahan Brazil, mengutip *Latino Barometros* dalam survei 2017-2018, menurut laporan, minimal kepercayaan kepada pemerintah hanya 6 persen, dan kepuasan terhadap demokrasi hanya 9 persen. Ini lebih dari dua per-lima warga Brazil yang menginginkan demokrasi. Despotisme bahkan lebih buruk (Doctor 2019)

Semenjak tahun 2014 Brazil mengalami instabilitas ekonomi yang terus berlarut, hal ini diindikasikan oleh Manrukh Doctor dalam penelitiannya,

yang kurang lebih memaparkan bahwa pada akhir 2014, ekonomi Brazil memasuki resesi dua tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana produk domestik bruto turun secara kumulatif 8 persen. Pengangguran naik di atas 12 persen – 23 persen jika setengah menganggur dimasukkan – dan investasi terhenti. (Doctor 2019). Tahun 2017 tingkat pengangguran naik ke rekor 12,7 persen dan setengah pengangguran mempengaruhi 23,8 persen populasi yang aktif secara ekonomi (Hunter and Power 2019) selain itu, adapun kebijakan penghematan yang secara signifikan berdampak terhadap rakyat Brazil (Doctor 2019).

Dari sudut pandang ekonomi dan politik, krisis yang sedang berlangsung ini telah menyebabkan ketidakpuasan rakyat Brazil dan menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan; setelah munculnya krisis ekonomi dan korupsi pemerintah, situasinya semakin memburuk dan keamanan publik memburuk dengan cepat. Dengan pembunuhan mencapai level rekor, ada lebih dari 63.000 serangan teroris pada

tahun 2017 (Doctor 2019). Hal ini yang mendorong Masyarakat Brazil memilih pandangan politik baru yang berbeda dari sebelumnya, dan menjadi kekuatan kampanye dari Jair Bolsonaro untuk memenangkan pemilu 2018 di Brazil.

Dari rangkaian dinamika ekonomi politik di Brazil semenjak 2014, nampak jelas bahwa determinisme ekonomi sangat signifikan dalam mempengaruhi dan memperburuk keadaan krisis di Brazil yang berimbas pada pelbagai aspek yang berkaitan seperti halnya politik, kepercayaan terhadap pemerintahan hingga meingkatnya tindakan kekerasan. Maka salah satu kepentingan pemenuhan kebutuhan domestik Brazil adalah perihal memperkecil instabilitas ekonomi yang tengah terjadi.

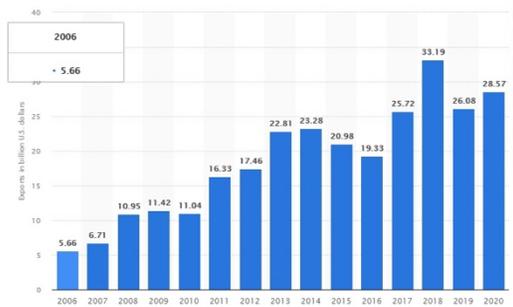
Untuk menghasilkan langkah yang strategis dengan tajuk kepentingan nasional Brazil, perlulah penyelarasan terhadap lingkungan strategis Brazil dengan memanfaatkan kapasitas keunggulan Brazil khususnya dalam segmen agrikultur. Maka perlulah penjabaran lebih lanjut terhadap lingkungan strategis Brazil dan

keunggulan yang bisa dimanfaatkan dari Brazil itu sendiri.

Lingkungan Strategis (environmental external) Brazil

Brazil telah memimpin sebagai produsen kedelai terbesar di dunia, setelah baru-baru ini melampaui Amerika Serikat. Brazil merupakan negara terbesar dalam hal produksi kedelai di dunia, dengan kapasitas produksi kedelai 125 juta ton. Selain posisi terdepan dalam produksi, Brazil juga menempati peringkat sebagai pengeksport kedelai terbesar di dunia. Daya ekspor yang tinggi berkaitan erat dengan permintaan di Cina, yang sejauh ini merupakan negara tujuan terpenting ekspor kedelai Brazil. Serta ekspor kedelai dari Brazil ke negara Asia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2018 (Statista Research Department 2021).

Grafik 2. Ekspor kedelai Brazil 2006-2020 (Dalam satuan miliar dolar AS)



Sumber: Statista Research Department 2021

Lingkungan strategis Brazil mempengaruhi tingkat ekspor kedelai secara signifikan, studi kasus yang kongkret adalah adanya fenomena perang perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina mengalami eskalasi, menghasilkan pemberlakuan tarif kedelai negara Amerika Utara yang menyebabkan harga kedelai Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan komoditas kedelai Brazil, fenomena ini menjadi keuntungan bagi Brazil karena Cina beralih yang semula impor kedelai dari Amerika Serikat menjadi impor kedelai Brazil. Cina mengimpor hampir setengah dari kedelai Matopiba. Selain dari perang dagang AS-Cina, hal yang

mendorong impor besar-besaran oleh Cina adalah adanya kekurangan produksi tanaman protein dalam negeri Cina yang menjadi faktor pendorong impor komoditas kedelai sebagai pakan ternak dari Brazil dan diikuti oleh Uni Eropa sebagai pengimpor terbesar kedua (Kuepper, Steinweg, and Rijk 2019).

Hal ini diperkuat oleh data dari *International Institute for Sustainable Development* (IISD) dengan menegaskan bahwa Negara pengekspor kedelai terbesar pada tahun 2017, berdasarkan nilai, adalah Brazil (USD 26,1 miliar), Amerika Serikat (USD 22,8 miliar), dan Argentina (USD 3 miliar), dan negara pengimpor terbesar adalah Cina (USD 38,1 miliar), Meksiko (USD 1,7 miliar), dan Belanda (USD 1,6 miliar) Tren ini diproyeksikan berlanjut hingga 2020, dengan negara-negara penghasil kedelai diperkirakan akan mengakhiri tahun produksi dengan sekitar 47 juta ton stok (Voora, Larrea, and Bermudez 2020).

Terlebih, Konsumsi produk kesehatan berbasis daging dan kedelai terus meningkat, sementara jumlah penduduk diperkirakan akan meningkat,

dan pembuat kebijakan lebih mendukung biodiesel sebagai alternatif bahan bakar. Selain itu melihat secara khusus proyeksi peningkatan dalam konsumsi daging global, ini terutama di antara kelas menengah yang tumbuh di negara berkembang, yang berarti akan ada permintaan yang kuat untuk kedelai sebagai pakan ternak pilihan (Voora, Larrea, and Bermudez 2020).

Di sisi lain, banyaknya kegunaan kedelai akan menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan permintaan, karena pasar kedelai dapat disegmentasikan ke dalam pakan ternak, makanan dan minuman, perawatan pribadi, suplemen makanan, obat-obatan, dan biomaterial, termasuk *biofuel*. Di tingkat regional, Asia diperkirakan akan mendorong pertumbuhan permintaan kedelai. Permintaan ini akan dipimpin oleh Cina, mengingat, dalam satu dekade terakhir, negara tersebut menyumbang hampir dua pertiga dari pertumbuhan permintaan global. Eropa adalah pasar kedelai terbesar kedua, mengkonsumsi sekitar 12 persen dari produksi kedelai global pada 2017 (Voora, Larrea, and Bermudez 2020).

Dengan kondisi dinamika lingkungan strategis dalam aspek agrikultur terkhususnya pasar kedelai dunia yang strategis, dapat dilihat benang merah dari kebijakan-kebijakan Bolsonaro yang berupaya merehabilitasi instabilitas ekonomi di Brazil sebagai pemenuhan kebutuhan domestik dengan instrumen agrikultural yang salah satunya adalah komoditas kedelai yang memiliki keutungan komparatif yang signifikan dibanding produsen lain.

Maka sangat jelas bahwa kebijakan-kebijakan pro pasar perihal perluasan lahan dan kaitannya terhadap investasi di bidang agrikultur menjadi opsi yang sangat strategis bagi Brazil dalam upaya rehabilitasi krisis ekonomi yang tengah dihadapi Brazil. Hambatan perluasan lahan bagi perkebunan kedelai di hutan Amazon menjadi masalah tersendiri bagi orientasi rehabilitasi krisis ekonomi Brazil, hal ini merasionalisasi kebijakan pelegalan perluasan lahan serta pemangkasan anggaran berbagai institusi peninjau lingkungan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dan hal ini ditujukan untuk mendorong produksi bidang agrikultur terkhususnya

komoditas kedelai. Dan hal ini diperkuat dengan legitimasi sebagai kepentingan nasional Brazil. Serta hal ini pun dipertegas oleh narasi Bolsonaro sendiri yang mengungkap cita-citanya untuk memanfaatkan permintaan makanan dunia yang terus menerus meningkat (Schepers 2019).

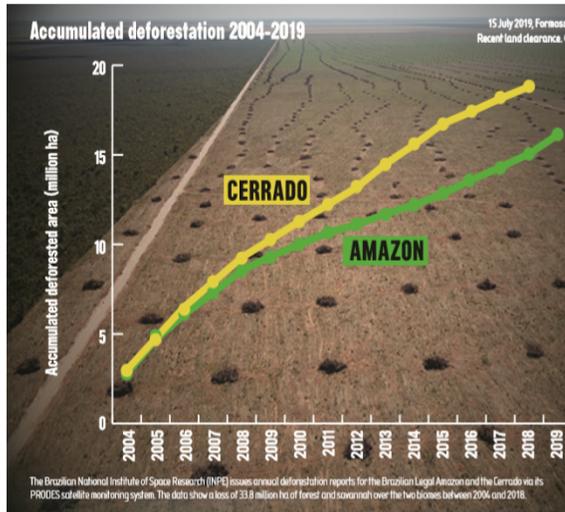
Namun, kepentingan nasional Brazil di bidang ekonomi tidak menghasilkan *win-win solution* bagi nilai ekologi di Brazil, terutama di hutan hujan Amazon dan sekitarnya. Implementasi kebijakan pro pasar dan kontra lingkungan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kelestarian bioma Amazon.

Dampak Implementasi kebijakan Bolsonaro terkait perlindungan hutan

Langkah dan kebijakan Bolsonaro terkait perlindungan hutan menghasilkan implikasi serius terhadap kelestarian hutan Amazon dan sekitarnya. Terbukti dengan terjadinya peningkatan deforestasi hingga fenomena kebakaran hutan pada tahun 2019. Laju deforestasi tahunan telah mencapai rekor baru

dengan angka kisaran satu juta hektar hutan telah digunduli tiap tahun untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Deforestasi terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2019 jumlah kebakaran hutan mencapai 111 persen dibandingkan dengan tahun 2018, serta sekitar 2,5 juta hektar dibakar pada bulan Agustus 2019 menurut data INPE per 3 September (Greenpeace 2019). Tentunya kebakaran yang terjadi terlepas dari faktor musim kemarau, dan kekeringan yang biasanya menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran tersebut. "Fire Day" yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2019 dengan dukungan Presiden Jair Bolsonaro juga memperparah kebakaran di kawasan Amazon. Menurut laporan, pada 10 Agustus, jumlah bermalam di hot spot di Novo Progresso City meningkat 300 persen, dan jumlah hot spot di Altamira City meningkat hampir 750 persen. Di hari kedua, jumlah kasus di tiap daerah meningkat tajam hingga lebih dari 200 kasus (Greenpeace 2019).

Grafik 3. Akumulasi deforestasi 2004-2019.



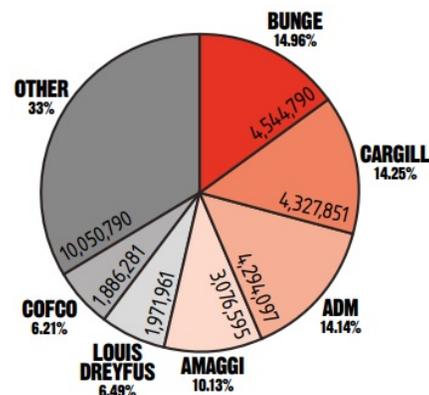
Sumber: Greenpeace 2019

Faktanya ancaman deforestasi tidak hanya ada di Amazon, tapi juga di kawasan Cerrado. Di bawah tekanan berbagai komitmen (Moratorium, Paris Agreement, dan lainnya) dan aktor (aktivis, masyarakat internasional, negara asing) yang prihatin tentang pembangunan berkelanjutan Amazon, upaya untuk mengurangi deforestasi di kawasan Amazon memiliki dampak yang signifikan, tetapi ketika akumulasi modal harus terus berlanjut, akan muncul masalah baru, kemudian seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, ekspansi kapital bergerak menuju ranah-ranah yang kurang

diperhatikan oleh para aktivis dan pemerhati lingkungan lainnya seperti halnya yang terjadi di Cerrado.

Aktor pendorong pembukaan lahan dan ekspansi kapital masih tetap didominasi oleh industri pertanian dan peternakan yang membutuhkan perluasan lahan untuk menyelaraskan dengan permintaan global yang terus meningkat terkhususnya untuk komoditas kedelai sebagai pakan ternak berprotein tinggi serta untuk komoditas daging ternak. Greenpeace mengindikasikan beberapa perusahaan multinasional yang berkaitan secara signifikan dengan pembukaan lahan hutan di Cerrado yaitu Amaggi Brazil, ADM, Bunge, Cargill, COFCO International dan Louis Dreyfus.

Grafik. Eksportir kedelai terbesar di Cerrado 2017 (volume dalam ton)



Sumber: Greenpeace 2019

Para perusahaan multinasional yang terindikasi secara signifikan terkait dengan pembukaan lahan, telah mampu mengendalikan sebagian besar perdagangan kedelai Amazon ke pasar global, hal ini berkorelasi dengan aktor lainnya seperti halnya para asosiasi petani yang menuntut untuk menyudahi moratorium kedelai (Greenpeace 2019).

Dalam lanskap kondisi politik di Brazil pada 2019, berhasil merepresentasikan skema relasi yang selaras antara pelaku bisnis dengan kepentingan nasional Brazil yang berdampak terhadap kelestarian hutan Amazon dan sekitarnya yang tidak terlepas dari fenomena deforestasi yang ditujukan untuk pembukaan lahan baru. Presiden, bersama dengan parlemen dan kelompok senat masing-masing, mengesahkan undang-undang yang mendukung ekspansi peternakan yang tidak diatur. Sapi yang dipelihara di peternakan telanjang dijual ke industri makanan, yang mengekspor sebagian dari apa yang dihasilkan. Agribisnis mendanai kursi di Parlemen dan Senat, yang memilih mendukung pemeliharaan

ternak, sehingga memulai kembali siklus tersebut (de Area Leão Pereira et al. 2020).

Dengan jelas Brazil dihadapkan dengan kondisi dimana akumulasi kapital yang didorong oleh dua kepentingan elemen yang kuat yaitu antara kepentingan dari logika kapitalistik dan logika teritorial yang secara tujuan berjalan secara harmonis. Logika teritorial yang direpresentasikan oleh pemerintahan Brazil memiliki orientasi berupa stabilisasi ekonomi dan politik di Brazil yang masih berlarut dalam instabilitas, di sisi lain logika kapitalistik memiliki kepentingan yang berorientasi surplus tanpa batas, dan dalam tahun 2019 kedua logika ini berada dalam momentum yang selaras dalam memenuhi kepentingannya.

Melegitimasi kembali narasi konsep Hannah Arendt perihal akumulasi kapital bahwa akumulasi kapital tanpa batas harus diiringi oleh kekuasaan yang tak terbatas pula (Harvey 2003). Serta mengutip Scheper bahwa cita-cita pemerintahan Brazil di bawah kekuasaan Bolsonaro adalah

memanfaatkan permintaan makanan global (Schepers 2019). Juga diperkuat oleh kebijakan yang mempermudah akses pembukaan ruang baru di Amazon dengan *Provisional Presidential Decree* yang dikenal dengan MP910 (Brazil Government 2019), menjadi tiket emas bagi para aktor agribisnis sebagai representasi logika kapitalistik berekspansi ke ranah rendah nilai baru dalam wilayah teritorial hutan Amazon dan sekitarnya. Dan tentunya ekspansi yang dilakukan akan menghasilkan reorganisasi spasial yang mempengaruhi pelbagai aspek terkait, terutama dalam aspek ekologi yang secara kontras menjadi terancam dengan kegiatan pembukaan lahan baru rendah nilai dengan instrumen deforestasi.

Selain daripada itu, ekspansi kapital yang terjadi ke ranah-ranah baru di hutan hujan Amazon harus dilihat sebagai proses yang tidak terlepas dari hambatan (meskipun secara sistematis telah mendapat kemudahan). Hambatan dalam ekspansi kapital sering dibarengi dengan konfrontasi dengan elemen yang secara signifikan bersinggungan langsung

dengan ranah yang akan diekspansi oleh kapital yaitu elemen masyarakat adat.

Masyarakat adat mengalami ancaman pengusiran dari tanah yang bersinggungan dengan ekspansi kapital yang terjadi. Yang menjadi masalah serius adalah Masyarakat adat sendiri yang tidak bisa terlepas dari corak produksinya yang secara langsung bersumber dari alam, maka hal ini menghasilkan konsekuensi di mana elemen-elemen masyarakat adat tidak akan menghendaki akumulasi kapital di tanah adat mereka, alhasil menghasilkan perlawanan untuk tidak terusir dari tanah adatnya sendiri.

Tercatat dengan singgungan tersebut, banyak insiden intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai kasus kongkret, masyarakat adat yang dikenal sebagai *Geraizeiras do Alto Rio Preto* yaitu masyarakat adat di Sungai Preto Atas pada 28 Mei 2019, tim investigasi dari organisasi non pemerintah, Greenpeace Brazil serta beberapa jurnalis menjadi saksi terhadap serangan bersenjata di salah satu masyarakat ini. Ada beberapa kasus lainnya yaitu pada tanggal 7 April 2019

perihal penahanan secara ilegal presiden komunitas Cachoeiragenizeira oleh anggota bersenjata Estrela Guia (Greenpeace 2019).

Fenomena yang terjadi di Brazil tak luput dari sorotan masyarakat internasional. Kebakaran hutan yang dilakukan secara legal bahkan ilegal untuk menyediakan ranah-ranah baru yang dapat menjadi lahan produksi komoditas agrikultural telah mengindikasikan keadaan hutan hujan Amazon dalam kondisi darurat, selain itu awan asap raksasa telah menyebar jauh kisaran ratusan mil (Watts 2019), memantik kekhawatiran berlebih dari masyarakat internasional perihal destabilisasi iklim yang diakibatkan oleh degradasi ekologi hutan Amazon.

Menjadi catatan penting dari kebakaran hutan adalah dampaknya yang berkorelasi terhadap berbagai resiko yang dapat mengganggu kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Bila pohon mati (baik karena proses penebangan, alami, hingga pembakaran) karbon yang tersimpan di dalamnya lepas ke atmosfer, kadang

selama berabad-abad. Dengan cara demikian pohon lebih mirip batu bara. Itulah salah satu dampak dari kebakaran hutan bagi emisi gas rumah kaca. Dampak pelepasan gas emisi dari pohon termasuk yang paling ditakuti di antara berbagai lingkaran umpan balik iklim. Hutan-hutan di Amazon, yang biasanya menyerap karbon akan menjadi sumber karbon, melepas gas yang terserap. Hal ini menghasilkan dampak yang cukup dramatis (Wells 2019).

Pohon-pohon di Amazon menyerap seperempat dari seluruh karbon yang terserap hutan tiap tahun. Namun dengan fenomena yang telah dijabarkan di bagian sebelumnya (perihal kebijakan Bolsonaro dan kebakaran hutan), sekelompok pemerhati lingkungan Brazil telah memperkirakan bahwa antara 2021 dan 2030, penggundulan hutan akibat kebijakan Bolsonaro bakal melepas 13,12 gigaton (Wells 2019). Dalam hal ini, kebijakan perihal pelegalan perluasan lahan dan sikap acuh terhadap lingkungan ala Bolsonaro akan setara dua atau tiga kali dampak emisi tahunan seluruh ekonomi

Amerika Serikat (menyertakan semua pesawat terbang dan mobil serta pembangkit listrik batu bara (Wells 2019).

Selain itu, kebakaran hutan memiliki efek yang tidak linear ataupun menumpuk dengan sederhana. Ia mampu untuk memberi pengaruh kepada curah hujan dan tingkat kekeringan tanah, hal ini berimbas pada hal-hal yang berkelindan dengannya, seperti halnya potensi ancaman bencana longsor akibat kekeringan tanah dan ketiadaan pohon, banjir tahunan, hingga ke penyebar luasan nyamuk malaria akibat hilangnya pohon. Serta yang paling terasa secara langsung adalah polusi udara yang menyerang sistem pernapasan manusia (Wells 2019).

Kebakaran hutan yang terjadi di Amazon menuai berbagai respon dari masyarakat Brazil hingga masyarakat Internasional dengan berbagai protes. Protes muncul di puluhan kota hingga di berbagai negara, dan ribuan kecaman menyasar terhadap implementasi kebijakan Bolsonaro yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan, Emmanuel Macron pada bulan Agustus

2019, memposting tweet sebagai respon terhadap kebakaran yang terjadi dengan mengatakan “rumah kami terbakar” serta diikuti oleh seruan pembicaraan darurat tentang masalah lingkungan hidup di Brazil khususnya Amazon pada KTT G7 (Watts 2019).

Tidak hanya respon dari Macron, pada bulan Agustus 2019 Jerman turut merespon permasalahan yang terjadi di Brazil dengan pemberhentian donasi yang semula dianggarkan untuk konservasi di Brazil (Casado 2019). Serupa dengan Jerman, Norwegia merespon permasalahan lingkungan hidup di Brazil dengan pemberhentian donasi konservasi di Brazil, di sisi lain Uni Eropa merespon dengan menandatangani perjanjian perdagangan baru dengan Amerika Selatan (Watts 2019).

Dengan berbagai tekanan yang timbul dari berbagai elemen domestik maupun internasional terhadap fenomena permasalahan lingkungan hidup di Brazil terkhususnya kasus kebakaran hutan akibat implementasi kebijakan yang kurang pro terhadap lingkungan, menghasilkan pengaruh

yang signifikan. Tercatat pada akhir Agustus 2019, Bolsonaro langsung bertindak untuk merespon pelbagai reaksi terhadap permasalahan lingkungan hidup di Brazil dengan memerintahkan pasukan ke Amazon dan mengadakan larangan 60 hari untuk pembakaran tempat terbuka di Amazon dan sekitarnya, hal ini terbukti signifikan dalam mengurangi deforestasi hutan lewat pembakaran. Jumlah kebakaran hutan di Amazon turun menjadi 33,3 persen antara Agustus dan September (Hughes 2019).

SIMPULAN

Dinamika deforestasi di Brazil senyatanya berjalan secara dinamis, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan, menghasilkan ancaman terhadap kelangsungan hutan Amazon dan sekitarnya. Namun pada tahun 2019 implementasi berbagai kebijakan Bolsonaro berdampak signifikan terhadap angka deforestasi di hutan Amazon dan sekitarnya. Hal ini secara kontras berkaitan langsung dengan

kepentingan perusahaan multinasional yang berupaya untuk memenuhi permintaan makan dunia yang mendorong perlunya perluasan lahan produksi demi meningkatkan produktivitas.

Meskipun angka kebakaran hutan telah mulai menyusut pada tahun 2019 disebabkan oleh tekanan protes berbagai elemen baik domestik maupun internasional, pada faktanya permasalahan krusial yang dapat ditelaah di kasus deforestasi Amazon adalah adanya sistem ekonomi yang senyatanya tidak dapat berdamai dengan kelangsungan lingkungan hidup di Brazil. Selama skema ekonomi tetap bertujuan untuk akumulasi kapital dan surplus tanpa batas, dan orientasi negara masih terpaku terhadap pendapatan per kapita yang harus terus meningkat, maka lingkungan hidup masih terancam oleh eksploitasi atas nama pemenuhan kepentingan aspek ekonomi baik dari sisi logika pemerintahan maupun dari logika kapitalistik.

Selama kedua logika berjalan secara harmonis, narasi ke arah krisis

iklim akan semakin nyata, dan jika ekonomi masih berjalan seperti *bussines as usual* maka kita sedang merakit bencana skala global yang akan berdampak kepada seluruh spesies di bumi. Kini, momentum yang tepat untuk kembali memfokuskan diskursus kritis bernuansa ekologis yang senyatanya menjadi kebutuhan yang mendesak. Penting halnya untuk memikirkan kembali dan menghasilkan inovasi melampaui imajinasi ekonomi yang mampu berdamai dengan kepentingan ekologi. Menjadi sebuah kewajiban untuk merumuskan ulang skema sistem alternatif sebagai tandingan sistem ekonomi hari ini yang berperan sebagai aktor antagonis terhadap kelestarian lingkungan hidup.

REFERENSI

- Aguiar, Danicley. 2019. "Bolsonaro's Christmas Gift to Perpetrators of Illegal Deforestation." Greenpeace.Org. 2019. <https://www.greenpeace.org/international/story/27962/bolsonaros-gift-to-perpetrators-of-illegal-deforestation/>.
- Area Leão Pereira, Eder Johnson de, Luiz Carlos de Santana Ribeiro, Lúcio Flávio da Silva Freitas, and Hernane Borges de Barros Pereira. 2020. "Brazilian Policy and Agribusiness Damage the Amazon Rainforest." *Land Use Policy* 92 (January): 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104491>.
- Butler, Rhett. 2009. "Brazilian Beef Giants Agree to Moratorium on Amazon Deforestation." Mongabay.Com. 2009. <https://news.mongabay.com/2009/10/brazilian-beef-giants-agree-to-moratorium-on-amazon-deforestation/#:~:text=Brazilian beef giants agree to moratorium on Amazon deforestation,-by Mongabay.com&text=Four of the world's largest,the Amazon rainforest%2C repor>.
- Casado, Ernesto Londoño and Leticia. 2019. "Amazon Deforestation in Brazil Rose Sharply on Bolsonaro's Watch." *New York Times News*. 2019. <https://www.nytimes.com/2019/11/18/world/americas/brazil-amazon-deforestation.html>.
- Df, Brasília. 2019. "Atos Do Poder Executivo." *Diário Oficial Da União Seção 1*. Vol. N° 239. Brazil. <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05152019121100004.
- Doctor, Mahrukh. 2019. "Bolsonaro and the Prospects for Reform in Brazil." *Political Insight* 10 (Brazilian Prospects for Reform): 22–25. <https://doi.org/10.1177/2041905819854313>.

- Gibbs, H. K., L. Rausch, J. Munger, I. Schelly, D. C. Morton, P. Noojipady, B. Soares-Filho, P. Barreto, L. Micol, and N. F. Walker. 2015. "Brazil's Soy Moratorium: Supply-Chain Governance Is Needed to Avoid Deforestation." *Science* 347 (6220): 377–78.
<https://doi.org/10.1126/science.aa0181>.
- Greenpeace. 2006. "Eating up the Amazon." *Europe*. Vol. c. Amsterdam.
<https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2010/2/eating-up-the-amazon.pdf>.
- . 2019. "UNDER FIRE." Amsterdam.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2020/04/86b5fe06-greenpeace_underfire_artwork_pages.pdf.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Edited by David Harvey. *Oxford University Press*. I. Vol. 37. New York: Oxford University Press.
[https://eatonak.org/IPE501/downloads/files/New Imperialism.pdf](https://eatonak.org/IPE501/downloads/files/New%20Imperialism.pdf).
- Hasan, Akhmad Muawal. 2018. "Jair Bolsonaro, Trump Versi Brazil Yang Kangen Kediktatoran Militer." *Tirto*.Id. 2018.
<https://tirto.id/jair-bolsonaro-trump-versi-brazil-yang-kangen-kediktatoran-militer-c5S7>.
- Hughes, Roland. 2019. "Amazon Fires: What's the Latest in Brazil?" *BBC News*. 2019.
<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49971563>.
- Hunter, Wendy, and Timothy J. Power. 2019. "Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash." *Journal of Democracy* 30 (1): 68–82.
<https://doi.org/10.1353/jod.2019.0005>.
- Husna, Atik Fadilatul. 2012. "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional Di Afghanistan Pada Periode Pemerintahan." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24093/1/ATIK.pdf>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kbbi*.Web.Id. 2016.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deforestasi>.
- Kuepper, Barbara, Tim Steinweg, and Gerard Rijk. 2019. "Feed and Livestock in Brazil, China, EU Consume Most Cerrado Soy." Washington DC.
www.chainreactionresearch.com;
- Laurance, William F. 1999. "Reflections on the Tropical Deforestation Crisis." *Biological Conservation* 91 (2–3): 109–17.

- [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(99\)00088-9](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(99)00088-9).
- Mandala, Yustika Kartika Putri. 2016. "Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Deforestasi Amazon." *Jurnal Hubungan Internasional* □ *Tahun IX, No.1*, no. Diplomasi, Deforestasi: 115–36.
- Moran, Emilio F. 1993. "Deforestation and Land Use in the Brazilian Amazon." *Human Ecology* 21 (1): 1–21.
<https://doi.org/10.1007/BF00890069>.
- Schepers, Emile. 2019. "Bolsonaro: I'll Save Amazon Rainforest by Giving It to Corporations." *Peoplesworld.Org*, 2019.
<https://doi.org/->.
- Silva, C. A., and Mendelson Lima. 2017. "Soy Moratorium in Mato Grosso: Deforestation Undermines the Agreement." *Land Use Policy* 71 (September): 540–42.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.011>.
- Statista Research Department. 2021. "Soybean Exports from Brazil from 2006 to 2020." *Www.Statista.Com*. 2021.
<https://www.statista.com/statistics/721173/soybeans-export-value-brazil/>.
- Voora, Vivek, Cristina Larrea, and Steffany Bermudez. 2020. "Global Market Report: Soybeans." *The International Institute for Sustainable Development*. Vol. I. Manitoba.
<https://www.iisd.org/system/files/2020-10/ssi-global-market-report-soybean.pdf>.
- Watts, Jonathan. 2019. "Amazon Rainforest Fires: Global Leaders Urged to Divert Brazil from 'suicide' Path." *The Guardian*, 2019.
<https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/23/amazon-fires-global-leaders-urged-divert-brazil-suicide-path>.
- Wells, David Wallace. 2019. *Bumi Yang Tak Dapat Dihuni*. Edited by David Wallace-Wells. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
www.gpu.id.
- Wilkinson, Bard, and Taylor Barnes and Marcia Reverdosa. 2018. "Brazil's Far-Right Bolsonaro Wins First Round of Presidential Election." *Cnn.Com*, 2018.
<https://edition.cnn.com/2018/10/07/americas/brazil-presidential-election-intl/index.html>.